

PROSIDING

ISBN: 978 - 602 - 7905 - 39 - 9



SEMINAR HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEKS DAN SAINS Edisi Keenam, Juli 2020

Diterbitkan Oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih

ANALISIS KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAYAPURA DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN DI TELUK YOUTEFA

Lazarus Ramandei Universitas Cenderawasih Jayapuraa Email:ramandeylaz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura dalam menanggulangi Pencemaran di Teluk Youtefa. Kinerja dinilai dengan menggunakan beberapa indikator yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Selain itu penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Badan Lingkungan Hidup. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Jayapura dan dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini berusaha untuk menggambarakan tentang suatu keadaan atau fenomena sosial tertentu dan melakukan penilaian mengenai permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik dokumentasi dan wawancara. Data menggunakan data primer dan sekunder, data primer didapat langsung dari informan yang terkait dengan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran di Teluk Youtefa baik dari Badan Lingkungan Hidup maupun dari masyarakat. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, dokumen dan sumber informasi lain yang terkait dengan penelitian. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan menanggulangi pencemaran di Teluk Youtefa telah dilaksanakan. Namun dari hasil yang dicapai belum menunjukkan hasil yang maksimal, dimana masih terjadi pencemaran air. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui kinerja Badan Lingkungan Hidup maupun dari masyarakat untuk ikut mancegah terjadinya pencemaran lingkungan. Namun demikian Badan Lingkungan Hidup sebagai aparat pelaksana sudah berusaha untuk menanggulangi pencemaran. Berdasarkan hasil penelitian maka BLH perlu meningkatkan produktivitasnya terutama pada kegiatan pencegahan, pengawasan dan penertiban.

Kata kunci : kinerja, pencemaran air limbah industri dan rumah tangga

PENDAHULUAN

hidup Lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, mempengaruhi yang kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Keraf, 2010). Lingkungan hidup ini terdiri dari 3 komponen utama fisik (abiotik), vaitu komponen komponen abiotik dan komponen kultur (Rusdina. 2015)... Dalam proses pelaksanaan pembangunan ketiga itu kemungkinan akan komponen mengalami perubahan atau lebih dikenal dengan kata akan terkena dampak. Dampak yang bersifat positif sangat diharapkan oleh manusia meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup (Manik, 2018). Sedangkan dampak yang bersifat negatif memang tidak diharapkan karena menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup, harus dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dinamika perkembangan hidup manusia menunjukkan bahwa semakin modern kehidupan manusia, semakin besar pula kerusakan dan pencemaran lingkungan ditimbulkannya yang (Pramudyanto, 2014). Di samping itu perkembangan kehidupan tersebut juga menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam di bumi ini (Adnan dkk., 2008). Jika kegiatan kelompok masyarakat jaman dulu menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam jumlah minimal, maka kegiatan kelompok masyarakat jaman sekarang ternyata menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda, sehingga Pemerintah selaku penyelenggara negara wajib mengeluarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup secara nasional (Sachoemar & Wahiono, 2018).

Prinsip-prinsip pengelolaan hidup di Indonesia telah dirumuskan salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut telah dirumuskan pengertian, tujuan dan asas serta sasaran maupun mekanisme dan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sesuai berfungsi tidak dapat (Undang- undang peruntukkannya Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 11). Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air, secara nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001, tentang Air dan Kualitas Pengelolaan Pengendalian Pencemaran Air.

Kota Jayapura merupakan kota yang sangat pesat pekembangannya di Provinsi Papua sehingga letaknya yang sangat strategis, yang memberikan keuntungan yang sangat menggiurkan bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Namun pertumbuhan industri juga membawa pengaruh buruk terhadap

pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

lingkungan kota, terutama pada sungai-sungai yang ada di Kota Jayapura. Sungai- sungai yang mengalir di sini mengalami pencemaran yang mengkhawatirkan. Sedikitnya ada 4 sungai yang melewati wilayah Kota Jayapura sudah dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan.

Kota Jayapura sebagai kota yang pertumbuhannya sangat pesat, terutama di bidang industri dengan berbagai limbah yang dikeluarkan dari proses produksi, memiliki potensi dampak pencemaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Pasal 9 mewajibkan setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air terlebih dahulu melakukan pengelolaan air limbah yaitu dengan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Di Kota Jayapura terdapat beberapa industri, baik industri makanan, industri mebel, industri tekstil, dll,

yang ikut menceemari sungai-sungai yang berdampak pada

Permasalahan pencemaran lingkungan di Kota Jayapura di tangani oleh Badan Lingkungan Hidup kota Jayapura. Tugas dari Badan Lingkungn Hidup adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura mengaku telah melakukan tindakan preventif maupun represif tetapi permasalahan masih ditemui. Untuk mengatasi permasalahan pencemaran karena air limbah, maupun pencemaran

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermaksud memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu (Gunawan, 2013). Arah kajian penelitian kualitatif adalah pada perilaku manusia sehari-hari dalam keadaan rutin secara apa adanya. Berdasarkan arah kajiannya penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja Badan Lingkungan

pencemaran Teluk Youtefa, seperti Sungai Hanyaan, Acai, Sbohonry di sungai-sungai diperlukan adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga dan menanggulangi pencemaran lingnungan terutama berdampak yang pencemaran teluk Youtefa dan kemampuan dari Pemerintah kota dalam menanggulangi pencemaran air limbah bertanggungjawab, secara sehingga kinerja penanggulangan pencemaran baik limbah industri maupun keluarga bisa diatasi dengan baik.

Hidup dalam menanggulangi pencemaran di Teluk Youtefa. Karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan, menafsirkan dan menganalisis kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura dalam menanggulangi Pencemaran di Teluk Youtefa. maka penelitian ini dikategorikan sebagai bentuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial tertentu.

Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura. Adapun pemilihan lokasi tersebut karena: Badan Lingkungan Hidup merupakan Badan atau Lembaga pemerintahan yang diberi kewenangan oleh pemerintahan di bidang perlindungan lingkungan hidup.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Wawancara: Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Kampung Nafri, juga Tobati yang Enggros, merasakan dampak akibat kinerja Badan Lingkungan Hidup.
- Observasi :Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda serta rekaman gambar.
- 3. Dokumentasi :Dokumentasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen yang relevan dengan penelitian berupa arsip, laporan, peraturan, dokuman, dan literatur lainnya.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka teknik pengambilan sampel dilakukan secara selektif dengan menggunakan pertimbangan secara teoritis, keinginan dari peneliti. karakteristik empiris, serta kebutuhan dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel vaitu purposive sampling atau sampel bertujuan, dimana peneliti cenderung menggunakan atau memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui permasalahannya secara lengkap tanpa didasarkan pada strata maupun random, tetapi lebih ditekankan pada tujuan tertentu (Gunawan, 2013).

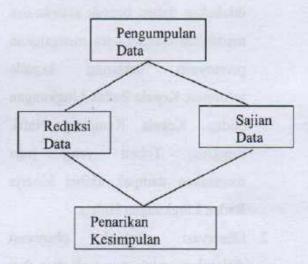
Validitas Data

Untuk menentukan keabsahan atau validitas data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan data vang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu (Moloeng, 2009). Ada 4 macam trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan vang menggunakan pemanfaatan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, trianggulasi yang digunakan adalah trianggulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Ini dilakukan dengan dengan cara membandingkan data wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang sama dari sumber lain (Bachri, 2010).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Model yang

digunakan adalah model analisis yang dilakukan apabila inti data sudah diperoleh. Kemudian dilakukan dimana penulis penafsiran data mengungkapkan dalam bentuk uraianuraian dan penjelasan lainnya yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulankesimpulan serta saran-saran sesuai dengan penelitian ini. Dalam metode interaktif ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif
(H.B Sutopo, 2002:96)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Penanggulangan Pencemaran Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura

Untuk mengatur dan mencegah agar segala kegiatan yang dilaksanakan tidak oleh masyarakat agar terhadap kerusakan menyebabkan lingkungan hidup maka pemerintah mengeluarkan UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup mengatur segala aktivitas yang berkaitan hidup. Untuk lingkungan dengan mencegah pencemaran air, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pengendalian dan Air Kualitas dalam peraturan Pencemaran Air, pemerintah ini memuat persyaratan yang harus dipatuhi oleh pelaku kegiatan industri selama melakukan kegiatan industri. Tujuan dari PP No 82 tahun atau ini untuk mencegah 2001 meminimalisir terjadinya pencemaran terhadap sumber air yang diakibatkan oleh pembuangan limbah dari aktivitas industri maupun masyarakat secara keseluruhan. Untuk dapat mengetahi

kegiatan besar kinerja seberapa penanggulangan Pencemaran di Teluk Youtefa oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura yang telah dicapai selama ini, berikut dijelaskan dalam bab ini menggunakan indikatordengan indikator produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Selain itu juga akan dibahas faktor- faktor apa saja yang menghambat mendukung dan penanggulangan Teluk Youtefa.

1. Indikator Produktivitas

dipahami Produktivitas dapat sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang dalam periode tertentu. diperoleh Berkaitan dengan prodiktivitas ini kinerja Badan Lingkungan Hidup dapat diukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran air limbah industi. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Hidup. Lingkungan Pengendalian tersebut adalah Kegiatan-kegiatan pencegahan, penyuluhan, pengawasan

dan penertiban.

Dalam usaha untuk mengendalikan permasalahan lingkungan hidup pemerintah Daerah Kota Jayapura membentuk Instansi Pengendalian Lingkungan Hidup, di Kota Jayapura instansi tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemantauan terhadap setiap usaha dan

atau kegiatan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Badan Lingkungan Hidup menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan aktivitas industri yang dilakukan oleh masyarakat pelaku industri berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1. Baku mutu air berdasarkan PP No 82 Tahun 2001

Kelas	Baku Mutu										
	BOD	COD	рН	Seng	Tembaga	Krom	Nikel	Timbal	Nitrit	Nitrat	Kadmium
Kelas I	2	1.5	6-9	0.05	0.02	0.05	-	0.03	0.06	10	0.01
Kelas II	3	25	6-9	0.05	0.02	0.05	10	0.03	0.06	10	0.01
Kelas III	6	50	6-9	0.05	0.02	0.05	20	0.03	0.06	20	0.01
Kelas IV	12	100	5-9	2	0.2	1	20	1		20	0.01

Sumber: BLH Kota Jayapura, 2019

Keterangan:

Kelas I : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum

Kelas II : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi

air, pengelolaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman Kelas III : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air

tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman

Kelas IV : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman

Dari monitoring keadaan sungai-sungai yang ada menunjukkan terjadi kondisi pencemaran yang ada di beberapa sungai yang menunjukkan kenaikan dan penurunan beberapa kandungan yang terkontaminasi dalam air. Badan Lingkungan Hidup

memberikan alasan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh aktifitas kegiatan masyarakat serta aktifitas produksi kecil, maupun bengkel bengkel dan sangat banyak jumlahnya sehingga limbah yang dihasilkan juga banyak. Dari pemantauan yang dilakukan di

beberapa titik sungai, pencemaran

yang terjadi tidak bisa ditetapkan bahwa

pencemaran yang disebabkan oleh industri di sekitar situ namun lebih kerah

2. Indikator Responsivitas

Responsivitas di sini dilihat dari tanggapan Badan Lingkungan Hidup keinginan-keinginan dari terhadap masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat pelaku industri. operasionalnya Dalam Badan Lingkungan Hidup harus mampu menanggapi keluhan, tuntutan, kebutuhan para pelaku industri dan masyarakat sehingga penanggulangan terhadap pencemaran dapat dilaksanakan sebaik- baiknya. Terhadap keinginan dari pelaku industri serta masayarakat, responsivitas Badan Lingkungan Hidup dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat kegiatan Badan dari kegiatan-Lingkungan Hidup.

Dalam kegiatan sosialisasi jika ada pelaku industri dan masyarakat yang belum mengetahui suatu permasalahan petugas akan memberi informasi yang

2. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai kriteria untuk mengetahui sejauh mana Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Suatu

aktifitas masyarakat baik yang mendiami hulu hingga hilir setiap sungai.

dibutuhkan, dalam kegiatan pengawasan Badan Lingkungan Hidup memberikan terhadap pelaksanaan bantuan pengolahan limbah kepada industri yang belum melaksanakan seperti ketentuan yang telah ditetapkan serta kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan himbauan. Terkait dengan penertiban, petugas memberikan waktu bagi industri untuk memperbaiki apa yang tidak atau belum sesuai tersebut sebelum diberi surat peringatan tertulis, dalam tahapan ini pelaku industri juga diberikan kesempatan menjelaskan apa yang terjadi. Sementara itu responsivitas terhadap masyarakat umum juga cukup baik dengan adanya peran serta dari masyarakat dalam memberikan saran. pertimbangan, bahkan menyampaikan pendapat keluhan.

kegiatan organisasi publik memiliki tingkat akuntabel, jika kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup secara vertikal adalah kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Wali Kota Jayapura. Sedangkan akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup secara horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup kepada pemerintah bukan hanya masalah dana saja, tetapi pelaksanaan-pelaksanaan juga pada Badan kegiatan yang dilakukan Lingkungan Hidup apakah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, dan mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau tidak. Pelaksanaan kegiatan dalam menanggulangi pencemaran air limbah industri dan rumah tangga ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi, karena pada dasarnya mengacu pada aturan dari pemerintah dari sisi hukum dan undang-undangnya.

Pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup untuk menanggulangi Pencemaran di Teluk Youtefa belum memperoleh hasil yang maksimal karena masih terjadi beberapa kasus pencemaran. Pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup memang bukan hanya pada pencemaran industri saja tetapi juga terhadap masyarakat

secara luas, tetapi ada banyak program lain juga yang membutuhkan penanganan. Sedangkan pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup terhadap masyarakat lebih kepada pelaksanaan kegiatan.

Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura dalam menanggulangi Teluk Youtefa

- 1. Faktor Pendukung
- Dari Pihak Badan Lingkungan Hidup Perhatian dari pemerintah sangat terhadap pencemaran besar Teluk Youtefa, sehingga melalui beberapa Peraturan Daerah di Kota Jayapura lebih mengarah pada terciptanya kondisi lingkungan, Kebersihan dan lain-lain. Pemerintah mengadakan juga pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan.

b. Dari Pihak Masyarakat

Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan sudah merupakan awal yang baik. Meskipun dalam pengawasan dan penertiban masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan namun Badan Lingkungan Hidup mencoba mengatasi dengan sebaik- baiknya. Sebenarnya dari masyarakat sudah ada peningkatan kesadaran terhadap lingkungan hidup.

Badan Lingkungan Hidup juga dibantu oleh LSM yang peduli pada kelestarian lingkungan, yang turut membantu memantau keadaan lingkungan.

- 2. Faktor Penghambat
- a. Dari Pihak Badan Lingkungan Hidup Dalam pelaksanaan suatu program, dana merupakan faktor penting yang sangat menentukan. Tanpa adanya dukungan dana yang memadai mustahil

Terbatasnya anggaran yang dimiliki salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan pencemaran yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kotaKota Jayapura. Padahal perkembangan serta kegiatan industri/ pabrik kecil bertumbuh begitu pesatnya di Kota Jayapura dan terus berjalan dan cenderung meningkat. Sebagai akibatnya adalah kegiatan penyuluhan, pengawasan, penertiban.

suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancer. Sumber dana untuk pelaksanaan penanggulangan pencemaran air air limbah industri dan rumah tangga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura yang setiap tahun menganggarkan dana penanggulangan untuk kegiatan pencemaran. Namun alokasi dana yang ada masih kurang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura sebagai organisasi pemerintah yang dalam memiliki kewenangan permasalahan penanggulangan ini berusaha pencemaran mendayagunakan sumber daya yang ada dengan seefektif dan seefisien mungkin.

merupakan

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang harus dipersiapkan dan dipenuhi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam setiap kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air limbah industri dan rumah tangga. Dilihat dari sisi kuantitas, jumlah petugas masih kurang, terlebih lagi setelah sebagian besar pegawai telah ditarik sebagai pegawai provinsi setalah berlakunya Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang baru sesuai Perda Nomor 14
Tahun 2008. Sedangkan dari sisi
kualitas, pengetahuan yang dimiliki oleh
petugas Badan Lingkungan Hidup belum
memadai mengingat tugas- tugas dari
Badan Lingkungan Hidup mencakup
berbagai bidang ilmu pengetahuan.

b. Dari Pihak Masyarakat

Kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap penanggulangan pencemaran yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dapat dikatakan masih kurang. Masyarakat pelaku industri terkadang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup

KESIMPULAN

- Sikap petugas dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan pencemaran khususnya pencemaran air limbah dan rumah tangga sudah cukup baik, namun masih terdapat pelaku industri yang tidak peduli terhadap kegiatan.
- Secara umum pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan penanggulangan sudah cukup baik, namun masih saja terjadi pelanggaran. Hal ini karena pengawasan yang kurang maksimal karena jumlah petugas yang kurang memadai.
- Penegakan terhadap PP No. 82
 Tahun 2001 belum dilaksanakan

dalam pelaksanaan kegiatan industri mereka. Pencemaran dan perusakan lingkungan bisa diminimalisir jika pemilik industri menggunakan alat-alat pengendali pencemaran. Tetapi dalam prakteknya penggunaan alat-alat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit yang berpengaruh pada bertambahnya biaya produksi. Pencemaran dan perusakan lingkungan bisa diminimalisir bahkan dicegah jika pemilik industri menggunakan alat- alat pengendali pencemaran sertaproaktif dari masyarakat.

- secara optimal oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan penertiban, dimana belum diterapkannya secara tegas sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku industri.
- Dilihat dari monitoring sungai sesuai informasi dari BLH Kota Jayapura menunjukkan terjadinya tingkat pencemaran yang cukup tinggi terhadap kandungan zat kimia di dalam air sungai, hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah menanggulangi pencemaran belum menunjukkan hasil yang optimal. Namun hal ini

bukan hanya karena kinerja Badan Lingkungan Hidup yang kurang, namun juga dipengaruhi oleh

Saran

1. Produktivitas dari kegiatan pengawasan dan penertiban perlu itu Untuk ditingkatkan. pengawasannya perlu diintensifkan dengan mengadakan pengawasan sering. Kegiatan lebih yang penertiban memerlukan tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, E. L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y. L., & Munggoro, D. W. (Eds.). (2008). Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi. CIFOR.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62.
- Febriwahyudi, C. T., & Hadi, W. (2012). Resirkulasi Air Tambak Bandeng Dengan Slow Sand Filter. Jurnal Teknik Pomits, 1(1), 1-5.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*, 143.
- Keraf, A. S. (2010). Etika lingkungan hidup. Penerbit Buku Kompas.
- Manik, K. E. S. (2018). Pengelolaan lingkungan hidup. Yogjakarta: Kencana.
- Moloeng, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 14.

beberapa faktor dari luar organisasi.

- Akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup terhadap masyarakat perlu ditingkatkan karena dari pelanggaran yang dilakukan pemilik industri, masyarakatlah yang terkena dampaknya.
- Perlu di tingkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar pemerintah yaitu LSM untuk turut serta dalam mengawasi dan memantau pencemaran lingkungan.
- Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
- Perda No 6 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan H
- Pramudyanto, B. (2014). Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir. J. Lingkar Widyaiswara, 1(4), 21-40.
- Rusdina, A. (2015). Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Jurnal Istek, 9(2).
- Sachoemar, S. I., & Wahjono, H. D. (2018). Kondisi pencemaran lingkungan perairan di Teluk Jakarta. Jurnal Air Indonesia, 3(1).
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.